

**KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI  
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat S-1**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Oleh  
Harry Agusta P  
E 121 10 257**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

### KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

Disusun dan diajukan oleh :

Harry Agusta P

E 121 10 257

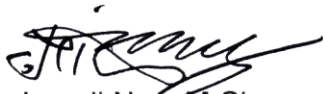
Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

pada tanggal 29 November 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Jayadi Nas, M.Si.  
NIP. 19710501 1998031 004

Pembimbing II,



Drs. Abdul Salam Muchtar  
NIP. 195401101986011001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Politik  
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si  
NIP. 19641231 198903 1 027

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Nurlinah, M.Si  
NIP. 19630921 198702 2 001

## LEMBARAN PENERIMAAN

Skripsi

### KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh  
Harry Agusta P  
E12110257

Telah diperbaiki  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
**Makassar, Kamis, 1 Desember 2016**

Menyetujui:

#### PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Jayadi Nas, M.Si

(.....)

Sekretaris : Drs. Abdul Salam Muchtar

(.....)

Anggota : Prof.Dr.H.A.Gau Kadir, Ma

(.....)

Anggota : Dr.Hj.Rabinah Yunus, M.Si

(.....)

Anggota : A.Lukman Irwan, S.IP, M.Si

(.....)

Pembimbing I : Dr. Jayadi Nas, M.Si

(.....)

Pembimbing II : Drs. Abdul Salam Muchtar

(.....)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, kasih dan anugerah-Nya yang selalu ada dan setia dalam sepanjang kehidupan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kewenangan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur”. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dengan selesainya skripsi ini penulis menyadari banyak kesulitan dan kendala yang penulis hadapi, akan tetapi semua itu dapat teratasi karena adanya dukungan dari berbagai pihak baik secara moral maupun material kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan, serta dengan ketulusan hati yang setinggi-tingginya kepada:

1. Orang tuaku, Ibunda Emmy Pangemanan yang telah yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya. Hingga kapan

pun penulis takkan mampu membalasnya. Sembah sujud ananda untuk meminta maaf karena seringnya menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ibu. Semoga balutan cinta dan kasih sayang-Nya selalu menyelimuti, dan member kesehatan serta keselamatan dunia akhirat bagi ibu.

2. Saudara-Saudariku yang tercinta Ray Sandi dan Yenny Lorents pangemanan yang telah menjadi pendorong dan yang memberi motivasi kepada penulis serta senantiasa memberi semangat dan kasih sayang. Serta dorongan moril dan materi. Kalian akan selalu menjadi saudara terbaik dan terhebat di kehidupan ini dan kehidupan mendatang, tidak pernah ada kekecewaan dan penyesalan di dalamnya.
3. Ibu Prof. Dr. Dwia Aristina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
5. Bapak Dr.H..A. Samsu Alam, M.Si., selaku ketua jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.

6. Ibu Dr.H. Nurlinah, M.Si., selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.
7. Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si. selaku Pembimbing I dan Drs. Abdul Salam Muchtar selaku Pembimbing II dan juga penasehat akademik bagi penulis yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Para Informan, khususnya kepada Bapak Drs. Budiman, M.Pd. selaku Asisten I Bupati Luwu Timur, yang Telah bersedia mewakili Bupati Luwu Timur sebagai informan. Serta Camat Wotu Awaluddin Anwar, S.STP dan instansi/lembaga yang terkait, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
9. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup FISIP UNHAS Penulis mengucapkan terimah kasih atas bimbingan dan bantuan selama ini.
10. Segenap keluarga Besar HIMAPEM FISIP UNHAS. Revolusioner (05), Rez-Publica (06), Renaissance (07), Glasnost (08), Aufklarung (09), Volksgeist (10), Enlighment (11), Fraternity (12), Lebensrum (13), (14),

(15) dan penerus yang akan datang. Terima kasih telah member banyak pengalaman hidup kepada penulis, Kebersamaan membuat kita merasa tidak sendiri. Kebersamaan membuat kita merasa lebih kuat .

11. Saudara seperjuangan Volksgeist yang telah mendahului, Ugha Ketua Angkatan yang bijak, ayyub, acil, akbarcarlos, arfananca, Bripdabondan, rimba, wahyu tarman, ryan, ricardo, firman, sam, adam, echa calon, Muh. Yusuf, lulu, evi, nana, eka, tuty, nely, kiki, ika monika, dina, yaya, riska, dian, ilmi, yeni, metha, megy, nio, tanty, amal, accang, tazbih, ikram, kasby, nazar, novri, wawan. Banyak ilmu yang kalian bagikan, banyak pengalaman yang kalian ajarkan. Terima kasih atas kebersamaan selama ini.

12. Teman-teman KKN UNHAS Gelombang 87, Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, terima kasih banyak, khususnya Kepala desa Padatuo yang telah menerima dan memfasilitasi segala kebutuhan kami selama berada di lokasi KKN, dan Sahabat Posko Desa Padatuo ilo, salma, ishak, risma, adi, fian, dan kiky terima kasih telah berbagi bersama.

13. Keluarga Besar tim Futsal Renaissance, terima kasih atas segala doa dan kebersamaanya.

14. Teman teristimewa yang telah menemani selama ini  
Asniati, terima kasih telah memberikan motivasi,  
semangat dan doanya.

15. Buat sahabat-sahabatku yang selama ini telah berjuang  
bersama-sama ishar, pepe hardiasyah, emir, dan cai.

16. Seluruh Mahasiswa FISIP UNHAS ( *BersamaBersatu  
Berjaya* ).

Akhir kata hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa  
segalanya dikembalikan, penulis sadar bahwa dalam penulisan  
skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari  
kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan yang penulis  
miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya  
membangun untuk menjadi perbaikan di masa yang akan datang.  
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.  
Amin. Tuhan Memberkati

Makassar, 29 November 2016

Harry Agusta Pangemanan



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
INTISARI .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Kewenangan.....	10
1. Jenis-jenis Kewenangan.....	13
2. Sifat Wewenangan.....	16
B. Konsep Koordinasi .....	22
1. Bentuk-bentuk Koordinasi.....	23
2. Tujuan Koordinasi.....	25
C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	26
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	26
2. Prinsip Pemberdayaan.....	30
2.3.3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.....	32
2.3.4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	33
D. Kerangka Konsep.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Tipe dan Dasar Penelitian .....	38

C. Teknik Pengumpulan Data .....	39
D. Informan Penelitian.....	40
E. Teknik Analisis Data .....	40
F. Defenisi Operasional.....	41

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran umum Kabupaten Luwu Timur .....	45
1. Letak dan Luas Wilayah.....	45
2. Keadaan Alam dan Iklim .....	47
3. Keadaan Demografi.....	49
4. Visi Misi Kabupaten Luwu Timur.....	52
B. Gambaran umum Kecamatan Wotu.....	53
1. Keadaan geografis.....	53
2. Demografi.....	55
3. Visi Misi Kecamatan Wotu .....	57
C. Kewenangan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur	59
1. Kewenangan Camat .....	59
D. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.....	76
1. Mendorong partisipasi masyarakat.....	76
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan.....	83
3. Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.....	87
E. Hal-hal yang mempengaruhi kewenangan camat.....	89
1. Kemampuan camat dalam memimpin.....	89
2. Saran dan prasarana.....	92
3. Dukungan anggaran.....	95
4. Komunikasi yang baik.....	106

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	109
B.	Saran.....	110

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### BAB IV

Tabel 1.	Luas Kecamatan Di kabupaten Luwu Timur .....	46
Tabel 3.	Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin .....	51
Tabel 1.	Luas wilayah menurut desa diwilayah kecamatan wotu .....	54
Tabel 2.	Tingkat kepadatan penduduk menurut desa di kecamatan wotu tahun 2014 .....	57
Tabel 1.	Banyaknya keluarga prasejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, dan sejahtera III plus ...	66
Tabel 1.	Program-program pemberdayaan masyarakat desa Bawalipu .....	68
Tabel 1.	Program-program pemberdayaan masyarakat desa Cendana hijau .....	69
Tabel 1.	Program-program pemberdayaan masyarakat desa Balo-balo.....	70
Tabel 1.	Program-program pemberdayaan masyarakat desa Lera .....	71
Tabel 3.	Program BK-PIPP kecamatan wotu desa Cendana hijau.....	97
Tabel 3.	Program BK-PIPP kecamatan wotu desa Balo-balo.....	98
Tabel 3.	Program BK-PIPP kecamatan wotu Desa Lampenai.....	99

Tabel 3.	Laporang perkembangan pinjaman Bulan januari tahun 2016.....	102
----------	---	-----

## DAFTAR GAMBAR

### BAB II

Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	37
------------------------------------	----

### BAB IV

Gambar 1. Gambar peta wilayah kabupaten Luwu Timur.....	47
---	----

Gambar 1. Gambar peta wilayah kecamatan Wotu.....	55
---	----

## **INTISARI**

**Harry Agusta Pangemanan, Nomor Induk E12110257, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul “Kewenangan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ”, dibawah Bimbingan Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si dan Bapak Drs. Abdul Salam Muchtar.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dan Hal-hal apa saja yang mempengaruhi Kewenangan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat member gambaran spesifik tentang Kewenangan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan teknik penentuan informan dilakukan dengan memilih informan yang berperan dan mengetahui secara teknis Kewenangan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian menguraikannya dan selanjutnya membuat kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kewenangan Camat Dalam mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur berjalan secara efektif, adapun tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: mendorong partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta melakukan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi Kewenangan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Wotu, meliputi: kepemimpinan Camat, sarana dan Prasarana, dukungan anggaran, dan komunikasi yang baik.

Kata kunci: kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat

## **ABSTRACT**

**Harry Agusta Pangemanan, E12110257, Governance Studies Program, Department of Political and Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin, Making the research paper with the title "In the Community Development Authority Head In District Wotu East Luwu regency", Guided by Dr.Jayadi Nas, M.Si and Drs. Abdul Salam Muchtar.**

This research aims to determine how the Community Development Authority Head In Wotu In District Luwu Timur and things that affect the Authority Head In Community Empowerment. The results of this study can give a specific overview on the Authority Head In Community Development In District Wotu East Luwu Regency.

This type of research is descriptive. Data is collected using observation, interview, literature, and documentation. Data were collected from a variety of sources and informant determination technique is done by selecting informants who know the technical role and authority of the Head of Community Empowerment. Data were analyzed qualitatively and then parse it and then make the conclusions.

Based on the results of this study explained that the Authority Head In coordinating the activities of the Community Empowerment In District Wotu Luwu Timur run effectively, while the task of Head in coordinating community development activities, include: encouraging community participation, guidance and supervision, as well as perform evalusasi community development activities. Things that affect the authority of the Head In the Community Empowerment In Sub Wotu, include: leadership Head, facilities and infrastructure, budget support, and good communication.

Key word: Authority Head In Community Development



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigmatis penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 209 Ayat (2) huruf f yakni, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, kecamatan”.<sup>1</sup>

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.

Tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 225 Ayat (1) tertuang beberapa tugas pokok camat.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.23 Thn 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1) huruf a, Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Kecamatan Wotu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Wotu menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu sub-sistem pemerintahan di Indonesia, Kecamatan Wotu yang mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan lebih banyak ditemukan di kecamatan Wotu.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2015 dan PP No.19 Tahun 2008 menunjukkan bahwa Camat selaku pemimpin kecamatan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan program-program dari instansi pemerintah dalam wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan program dari instansi-instansi lainnya di kecamatan berada di bawah koordinasi Camat. Salah satu program atau kegiatan dari instansi lainnya yang harus di koordinasikan oleh

Camat selaku pemimpin kecamatan adalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan amanat PP No. 19 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Hal serupa juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Luwu Timur No. 5 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 3(a) dimana salah satu yang menjadi tugas Camat Wotu yang dilimpahkan oleh bupati luwu timur adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Camat diharapkan mampu melihat potensi wilayah yang dimiliki dan ikut bertanggungjawab dan bertugas dalam hal kemajuan masyarakat dan lingkungan kerjanya. Persoalannya adalah kewenangan yang dimiliki Camat dalam menjalankan tugas umum pemerintahan lebih banyak hanya sebatas mengkoordinasikan, posisi Camat hanya sebatas dikoordinasikan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dalam wilayah kecamatan.

---

<sup>2</sup>Peraturan Daerah No.5 Thn 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Dalam UU No. 9 Tahun 2015 pasal 225 ayat (1) huruf b, kemudian PP No. 19 Tahun 2008 pasal 15 ayat (1) huruf a, serta PERDA Luwu Timur No. 5 Tahun 2008 pasal 5 ayat (3) huruf a, menjelaskan bahwa Camat diberikan kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang Desa dengan Jelas menyatakan bahwa salah satu yang menjadi kewenangan desa adalah memberdayakan masyarakat desa.

Dari uraian diatas nampak jelas perbedaan kewenangan antara Camat dan Desa dalam hal memberdayakan masyarakat. Kewenangan camat hanya sebatas koordinasi, sedangkan kewenangan desa bersifat membuat dan melaksanakan kebijakan. Inilah yang dapat menjadi salah satu masalah karena camat dan desa memiliki kewenangan yang sama dalam hal pemberdayaan masyarakat. Permasalahan lainnya adalah koordinasi antara Camat dan desa, karena tanpa adanya koordinasi yang baik dan harmonis, apa yang menjadi tujuan bersama tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Koordinasi diperlukan agar setiap kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat tidak menyimpang yang dapat menimbulkan permasalahan hukum, yang nantinya dapat merugikan semua pihak termaksud camat dan desa. Jika melihat UU No 9 Tahun 2015, PP No 19 Tahun 2008, Perda Luwu Timur

Tahun 2008 dimana Camat hanya bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan UU No 6 Tahun 2014 dimana desa kewengannya lebih kepada kebijakan, tidak dapat dipungkiri dapat terjadi permasalahan yang besar, dimana desa merasa lebih berhak dari pada Camat dalam hal memberdayakan masyarakat.

Peran camat sangat dibutuhkan dalam hal menjaga dan memelihara hubungan antara desa dan Camat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa camat adalah pimpinan wilayah. Diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik, agar terjalin hubungan yang baik, begitupun sebaliknya.

Sebagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Wotu berprofesi atau bekerja sebagai nelayan, petani, dan wirausaha. Persoalan yang dihadapi masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Wotu kurangnya lapangan pekerjaan dan taraf hidup yang kurang baik. Inilah yang menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh Camat dalam menjalankan kewenangannya untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat yang ada di wilayah kecamatan wotu, disinilah dapat dilihat peran serta Camat dalam menjalankan kewenangannya untuk mensejahterahkan masyarakatnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Salah satu pendekatan pembangunan untuk

penaggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah pada akhir-akhir ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka masalah penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur?
2. Apa saja yang mempengaruhi kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan kewenangan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi dan menggambarkan pelaksanaan kewenangan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan.



2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada masyarakat dan masukan atau evaluasi bagi pemerintahan yang ada di Kecamatan Wotu.
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat pemerintah yang dapat dijadikan sebagai sumber pustaka atau bahan bacaan, maupun mahasiswa yang ingin mengembangkan pengetahuan dalam kajian Kewenangan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian. Untuk membahas dan mengkaji masalah yang diangkat dalam penelitian digunakan konsep dan teori, yakni: konsep dan teori tentang kewenangan, koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat.

#### **A. Konsep Kewenangan**

Ferrazi mendefenisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan.<sup>3</sup>

Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.<sup>4</sup>

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik; namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari

---

<sup>3</sup> Ganjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007 hal 93.

<sup>4</sup> Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi Ilmu Administrasi, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1995 hal 78.

kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.<sup>5</sup>

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>6</sup>

Dari berbagai pengertian, kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Terry (1960) menyatakan bahwa: "*authority is the power or the right to act, to command, or to exact action by others*".

Kewenangan berkaitan dengan kekuasaan atau hak untuk melakukan atau memerintah, atau mengambil tindakan melalui orang lain. Sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65

Menurut Ensiklopedia Administrasi, sebagaimana dikutip oleh Wasistiono (2005), Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil. Sedangkan yang disebut tanggung jawab adalah keharusan pada seseorang pejabat untuk melaksanakan secara selayaknya segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban mempunyai kaitan sangat erat yang dapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan”.<sup>7</sup>

Merujuk pendapat Wasistiono (2005), Tugas adalah pekerjaan yang berkaitan dengan status yang harus ditunaikan oleh seseorang. Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang sah (*legitimate power*) atau kekuasaan yang terlembagakan (*institusinalized power*). Kekuasaan pada dasarnya adalah merupakan kemampuan yang membuat seseorang atau orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dalam pengertian administrasi, hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (organisasi). Dengan demikian disimpulkan bahwa dalam kewenangan terdapat kekuasaan dan

---

<sup>7</sup> Sadu Wasistiono, Dkk, *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa Ke Masa*, Fokusmedia, Hal. 48.

sebaliknya. Jadi kewenangan dan kekuasaan pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan”.<sup>8</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.<sup>9</sup>

## **1. Jenis-jenis Kewenangan**

Berdasarkan sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan delegatif

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup>F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006 hal. 219.

adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>10</sup>

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan, meliputi:

1. atribusi;
2. delegasi;
3. mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Lebih lanjut disebutkan, bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- a) berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
- b) bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan

---

<sup>10</sup> Sadu Wasistiono, Dkk, Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan, Bandung; Citra Pindo, 2005 hal 22.

wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan tertentu.<sup>11</sup>

Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (wewenang asli) oleh badan/atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan/atau jabatan pemerintah lainnya. Jadi, suatu wewenang delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Adapun, pengertian mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Suatu tindakan atau perbuatan yang mengatasnamakan badan/atau jabatan pemerintahan yang diwakilinya (bertindak untuk dan atas nama badan/atau jabatan pemerintahan).

Menurut pendapat H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt mendefenisikan atribusi sebagai suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Adapun, pengertian delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, dan pengertian mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta; Prenamedia Group, 2014 hal 112.

<sup>12</sup> Ibid.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggunggugat beralih kedelegataris.

Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrariusactus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggungjawab dan tanggunggugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi



mandate dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>13</sup>

## **2. Sifat Wewenang**

Dalam praktinya, keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintahan itu, maka tentunya pemerintahan tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan mungkin melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan berupa pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tanpa dilandasi atau disertai dengan wewenang pemerintahan.

Jika hal tersebut dilakukan, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang tanpa dasar alias perbuatan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, sifat dari wewenang pemerintahan perlu ditetapkan dan ditegaskan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pemerintahan dan/atau tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang.

Safri Nugraha dkk., mengemukakan bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek:

- a) Selalu terikat pada masa tertentu

---

<sup>13</sup>Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

- b) Selalu tunduk pada batas yang ditentukan
- c) Pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis.<sup>14</sup>

Safri Nugraha dkk., mengemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundang-undangan. Lama berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Sehingga bilamana wewenang pemerintahan itu digunakan dan tidak sesuai dengan sifat pemerintahan tersebut, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan itu bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Selain itu, sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu atau wewenang itu selalu tunduk pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangannya. Batas wilayah kewenangan berkaitan erat dengan ruang lingkup kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan tersebut.

Selanjutnya, dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan menetibkan keputusan

---

<sup>14</sup> ibid

yang bersifat mengatur dan keputusan yang bersifat menetapkan oleh organ pemerintahan. Indroharto mengemukakan bahwa;

- a) Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terperinci, maka wewenang pemerintahan semacam ini merupakan wewenang yang bersifat terikat.
- b) Wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan/atau pejabat pemerintah yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
- c) Wewenang pemerintahan yang bersifat bebas, terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan/atau pejabat pemerintah untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturandasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat

pemerintah untuk mengambil suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.<sup>15</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Camat mempunyai tugas yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 9 Tahun 2015 pasal 225 ayat (1) huruf b, dimana camat mempunyai tugas untuk mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat. Selain melaksanakan tugas tersebut, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 pasal 226 ayat (1), (2), dan (3).

Pelimpahan kewenangan yang didapat oleh Camat dari Bupati/Walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 pasal 15 ayat (2) huruf c, dimana camat memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi pada lingkup kecamatan. PP No. 19 Tahun 2008 pasal 15 ayat (1) huruf a, juga mengatur tentang tugas camat dimana camat bertugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi;

---

<sup>15</sup> Ibid.

- a) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- c) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- d) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Penjelasan lebih lanjut tentang kewenangan camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat diatur dalam Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (3) huruf a. Kemudian diperjelas sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46/IX/Tahun 2014 huruf j,

dimana Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok yang meliputi;

- a) Mempelajari pedoman
- b) Memproses bahan dan data
- c) Memproses kelengkapan administrasi
- d) Membantu pimpinan dalam menyusun kegiatan /program
- e) Memfasilitasi
- f) Melaporkan hasil pekerjaan terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat dan desa.

## **B. Konsep Koordinasi**

Dalam kamus besar bahasa indonesiakoordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Koordinasi berkaitan dengan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keharusan tertentu, sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya melalui proses yang tidak membosankan. Koordinasi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam

pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Hadari Nawawi berpendapat, koordinasi adalah kegiatan mengatur dan membawa personal, metode, bahan, buah pikiran, saran-saran, cita-cita dan alat-alat dalam lingkungan kerja yang harmonis, saling isi mengisi dan saling menunjang sehingga pekerjaan berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama. Sedangkan G. R. Terry mengemukakan bahwa, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron/teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

Pengkoordinasian merupakan upaya untuk menyelaraskan satuan-satuan, pekerjaan-pekerjaan, dan orang-orang agar dapat bekerja secara tertib dan seirama menuju kearah tercapainya tujuan tanpa terjadi kekacauan (chaos), penyimpangan, percecokan dan kekosongan kerja. Jadi koordinasi dapat dimaknai sebagai proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit lembaga untuk mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien.

## **1. Bentuk-bentuk Koordinasi**

---

<sup>16</sup> Taliziduhu Ndraha, Kybernology (ilmu pemerintahan baru) buku 1, Jakarta; Rineka Cipta, Cet Kedua, 2011 hal 290.

Dari sudut pandang politik, lahir berbagai sebutan buat koordinasi. Misalnya koordinasi horizontal, koordinasi vertikal, koordinasi diagonal. Tetapi dari sudut manajemen, koordinasi diidentifikasi melalui ada tidaknya dan jenis serta sifat hubungan antarunit kerja dalam lingkungan pemerintahan. Dari sudut pandang ini, diidentifikasi beberapa bentuk koordinasi, seperti:

a) Koordinasi waktu

Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan; jika berurutan, bagaimana urutan-urutannya. Koordinasi ini dilakukan antarunit kerja yang berhubungan dependen, kausal, dan sebangsanya.

b) Koordinasi ruang

Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.

c) Koordinasi interinstitusional

Yaitu koordinasi antarberbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serbaguna atau produk-bersama tertentu.

d) Koordinasi fungsional

Yaitu koordinasi yang dilakukan unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional



e) Koordinasi struktural

Koordinasi antar unit kerja yang berada dibawah struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak koordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela

f) Koordinasi perencanaan

Guna mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain. koordinasi ini berlangsung antarunit kerja yang berhubungan interdependen dan independen.

g) Koordinasi masukan-balik

Koordinasi hasil kontrol terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan adjusment, improvement, koreksi, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil satu bentuk koordinasi yang dapat digunakan dalam penelitian, adapun bentuk koordinasi yang sesuai adalah koordinasi perencanaan.

## **2. Tujuan Koordinasi**

Pengertian tentang koordinasi diatas menyiratkan bahwa koordinasi bertujuan

- a) Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan

---

<sup>17</sup> Taliziduhu Ndraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta; Rineka Cipta, 2011 hal 295.

dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.

- b) Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan
- c) Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling reponsif-antisipatif dikalangan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.<sup>18</sup>

### **C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

#### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini megasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak

---

<sup>18</sup> Ibid.

berubah atau tidak diubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas, kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal;

- a) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang , khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam;

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;

2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beberapa ahli dibawah mengemukakan defenisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et.al., 1987)
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987)

4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Menurut Ife pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas;

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan mobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Edi Suharto, Ph. D, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Bandung; PT. Refika Aditama, 2005 hal 57-60.

## **2. Prinsip Pemberdayaan**

Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial;

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.

7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.<sup>20</sup>

### **3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat, ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. upaya itu harus terarah ( *targetted* ). Ini yang secara populer disebut pemihakan. ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasimasalahnya dan sesuai kebutuhannya.
2. program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

---

<sup>20</sup> Edi Suharto, Ph. D, <sup>20</sup> Edi Suharto, Ph. D, Membangu Masyarakat Memberdayaka Masyarakat, Bandung; PT. Refika Aditama, 2005 hal 68-69.



Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

3. menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara sating menguntungkan dan memajukan.<sup>21</sup>

#### **4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

---

<sup>21</sup>Risyanti Riza, Drs.H. Roesmidi, M.M.2006. Pemberdayaan Masyarakat . Sumedang : Alqaprint Jatinangor.

Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan efektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat.

Kondisi efektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan efektivitas pembangunan.

#### **D. Kerangka Konsep**

Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Pasal 226 Ayat 1). Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh camat kemudian tertuang dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Pasal 225 Ayat (1) huruf b, dimana camat mempunyai tugas mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (2) dijelaskan bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi yang meliputi aspek; Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan,

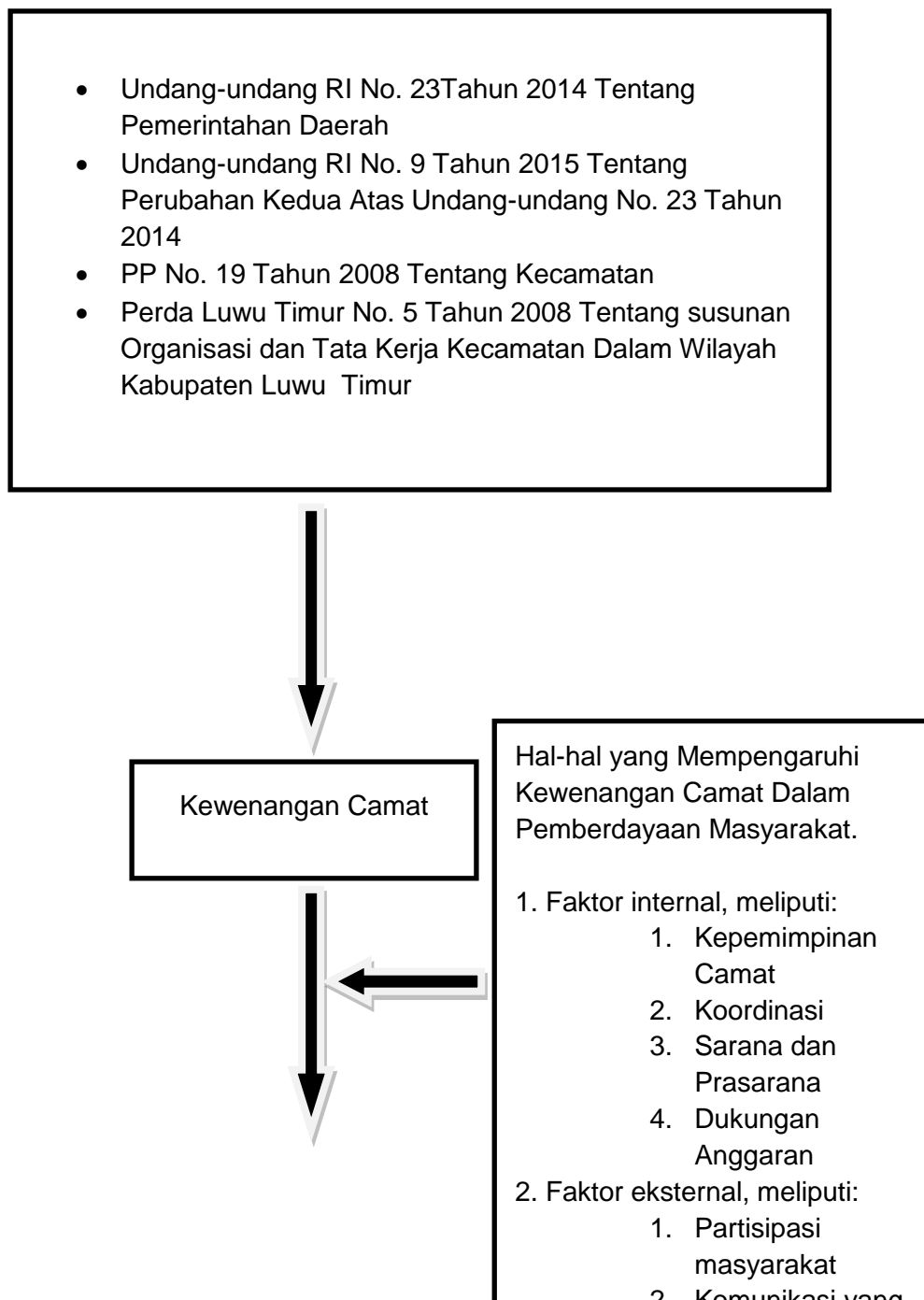
Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan, dan, Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Camat Wotu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 5 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (3) huruf a, dimana camat menjalankan tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2008 pasal 15 Ayat (2) huruf c, yaitu kewenangan untuk melakukan koordinasi yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan kewenangannya untuk memberdayakan masyarakat, Camat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud antara lain adalah kepemimpinan camat, koordinasi, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud antara lain adalah dukungan anggaran, partisipasi masyarakat, dan komunikasi yang baik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menggambarkan skema kerangka konsep sebagai berikut;

## KerangkaKonseptual



Pemberdayaan  
Masyarakat

Skema 1. Kerangka Konseptual

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, dengan pertimbangan untuk mengetahui kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Wotu. Hal ini didasarkan dengan banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat di kecamatan Wotu, dengan masih banyaknya masyarakat yang perlu diberdayakan dan disejahterakan.

##### **B. Tipe dan Dasar penelitian**

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian ini memberikan gambaran faktual, gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan

akurat, mengenai kewenangan camat dalam pemberdayaan masyarakat.

Menurut Robert C. Bogdan penelitian deskriptif adalah bagaimana menggambarkan dengan menggunakan ilustrasi sebuah kondisi tertentu berdasarkan objek yang sedang diteliti, penelitian deskriptif merupakan bagian yang ada didalam penelitian kualitatif.<sup>22</sup>

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer di peroleh melalui :
  - a) Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
  - b) Interview atau wawancara mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>22</sup>Robert C. Bogdan, Translater Ahli Bahasa Arief Furchandkk, *Qualitative Research For Education An Introducton To Theory And Methods*, Surabaya, Usaha Nasional :1992, Page. 30

2. Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi.

Adapun data skunder diperoleh melalui :

- a) Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penulusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.

Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>23</sup>

#### **D. Informan Penelitian**

Adapun informan yang memberikan data atau informasi yang tepat dan akurat didalam penelitian ini adalah:

- a. Bupati Luwu Timur/Asisten I (satu)
- b. Camat Wotu
- c. Instansi vertikal yang ada di Kecamatan Wotu
- d. Kepala Desa
- e. Tokoh Masyarakat.
- f. LSM
- g. Masyarakat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*



## **E. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif yakni data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data kuantitatif dan kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh.

Hasil penelitian baik dari hasil study lapang maupun *study literature* untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian, Robert C. Bogdan, menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang akan diceritakan kepada orang lain.<sup>24</sup>

## **F. Defenisi Operasional**

Setelah beberapa konsep dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai

---

<sup>24</sup>*Ibid*

tujuan penelitian, disusun definisi operasional yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain.

1. Kewenangan Camat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah camat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 dan Perda Luwu Timur No. 5 Tahun 2008, yaitu;

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

Dari ketiga penjelasan diatas ditentukan indikator untuk mengukur tingkat kemampuan Camat dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawabnya di Kecamatan Wotu, antara

lain; tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri musrenbang, tingkat keberhasilan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, serta bentuk evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan.

2. Faktor-faktor internal dan eksternal adalah faktor yang mempengaruhi kewenangan camat dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Adapun indikator-indikator faktor internal dan eksternal, antara lain;

a. Faktor internal

1) Kepemimpinan Camat

Kepemimpinan camat adalah kemampuan camat dalam mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela dan melaksanakan dengan sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan bersama.

2) Koordinasi

Koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit lembaga untuk mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai berupa alat-alat atau penunjang utama

dalam membantu terselenggaranya suatu proses dalam mencapai tujuan, misalnya komputer dan gedung.

#### 4) Dukungan anggaran

Dukungan anggaran adalah hal yang esensial dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat karena seperti yang diketahui bahwa setiap pelaksanaan program tentu memerlukan dana dalam menunjang terlaksananya kegiatan.

#### b. Faktor eksternal

##### 1) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya masyarakat atau dilibatkannya masyarakat dalam berbagai kegiatan yang direcanakan oleh pemerintah.

##### 2) Komunikasi yang kurang lancar antara masyarakat dengan pemerintah adalah kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang berbagai program-program dari pemerintah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum Lokasi penelitian dan hasil penelitian yang di dapatkan penulis selama melakukan penelitian tentang Kewenangan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur**

##### **1. Letak dan Luas Wilayah**

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten baru sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Secara definitif Kabupaten Luwu Timur terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 2003.

. Luas wilayah seluruhnya adalah 6.944,88 km<sup>2</sup> dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 11 kecamatan, berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Marowali Propinsi Sulawesi Tengah,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kendari dan Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 1 : Luas Kecamatan Di kabupaten Luwu Timur.**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Burau	256,23	3,69
2	Wotu	130,52	1,88
3	Tomoni	230,09	3,31`
4	Tomoni Timur	43,91	0,63
5	Angkona	147,24	2,12
6	Malili	921,20	13,26
7	Towuti	1.820,48	26,21
8	Nuha	808,27	11,64
9	Wasuponda	1.244,00	17,91
10	Mangkutana	1300,92	18,73
11	Kalaena	41,98	0,60
<b>Jumlah</b>		<b>6.949,88</b>	<b>100,00</b>

**Sumber : BPS Luwu Timur dalam angka tahun 2014**

Kecamatan Towuti merupakan wilayah kecamatan terluas dengan luas wilayah 1.820,48 km<sup>2</sup> atau sekitar 26,21 % dari luas wilayah kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan yang terkecil adalah kecamatan Kalaena dengan luas 41,98 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 0,60%. Adapun luas wilayah kecamatan Wotu berada pada urutan 9 dari 11 kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Dengan luas wilayah 130,52 km<sup>2</sup> atau sekitar 1,88% dari total luas wilayah kabupaten Luwu Timur.

**Gambar 1: Peta Kabupaten Luwu Timur**



**Sumber; BPS Kabupaten Luwu Timur**

## **2. Keadaan alam dan iklim**

Kedudukannya yang berada pada “jalur lintas” trans Sulawesi dan “wilayah perbatasan” seperti ini, sesungguhnya membawa peluang dan tantangan kepada daerah ini menjadi kawasan industri dan perdagangan strategis di masa depan. Posisinya yang berada di relung pesisir Teluk Bone, dapat menjadikan Kabupaten Luwu Timur sebagai pusat distribusi dan akomodasi barang dan jasa, dengan membuka aksesibilitas dan mengembangkan kerjasama fungsional dengan wilayah-wilayah sekitar, terutama dengan daerah-daerah yang memiliki bahan baku dan komoditi ekonomis karena sumber daya alam yang tersedia pada daerah dan wilayah tersebut.

Kesadaran terhadap ruang geografis dengan keunggulan tersebut, kemudian dapat melahirkan rancangan dan gagasan konsepsional guna menjadikan daerah kabupaten Luwu Timur sebagai “motor penggerak” ekonomi regional bagi pengembangan wilayah-wilayah disekitarnya, seterusnya bisa meraih kemanfaatan kerjasama wilayah, serta mengembangkan pola ekonomi yang saling menguntungkan dan saling menghidupi (symbiose mutualism) dengan daerah-daerah lain yang berada pada satu kawasan.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.949,88 km<sup>2</sup> atau sekitar 10,82 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan



berada diketinggian 0 – 1.230 m diatas permukaan laut (dpl). Curah hujan berkisar antara 2.800 s/d 3.980 mm/tahun dengan distribusi bulanan yang cukup merata. Dengan demikian, dari segi agroklimatologi, Kabupaten Luwu Timur sangat potensial untuk pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian.

Jika melihat struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi dan wilayah pesisir, yang kemudian disebut oleh banyak kalangan sebagai daerah “tiga dimensi”. Selain dari julukan itu, karena keunikan keberadaan 3 danau besar pada bagian timur wilayahnya, kabupaten ini juga disebut sebagai “negeri tiga danau”.

Danau yang dimaksud yaitu danau Towuti (luasnya 56.670 Ha), Danau Matano (luasnya 16.350 Ha), dan Danau Mahalona (luasnya 2.348) yang cukup potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, pembangkit listrik, dan kegiatan pariwisata. Disamping itu juga terdapat 2 (dua) buah telaga, yaitu Tapareng masapi (luasnya 234 Ha), dan Lontoa (luasnya 172 Ha).

### **3. Keadaan Demografi**

Dalam Paradigma baru, tujuan pembangunan nasional adalah mencapai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang maju, modern dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari paradigma baru tersebut tergambar jelas bahwa penduduk

merupakan obyek sekaligus subjek dari pembangunan. Sehingga data kependudukan merupakan piranti yang sangat diperlukan guna mengetahui profil penduduk di suatu wilayah dengan berbagai masalah social yang ditimbulkan.

Penduduk merupakan aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, mereka juga bisa menjadi beban pembangunan jika pemberdayaannya tidak dibarengi dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan, demikian pula bagi Kabupaten Luwu Timur. Penduduk merupakan aspek penting dalam berbagai indikator pembangunan karena selain sebagai subjek juga sebagai objek dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan rasio jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan jenis kelamin**

No	Kecamatan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Burau	17.681	17.166	34.841
2	Wotu	15.309	15.087	30.396
3	Tomoni	12.222	11.603	23.825
4	Tomoni Timur	6.601	6.378	12.979
5	Angkona	12.987	12.304	25.291
6	Malili	20.295	19.893	40.188
7	Towuti	17.342	15.468	32.810
8	Nuha	12.458	10.978	23.436
9	Wasuponda	11.102	9.619	20.722
10	Mangkutana	10.914	10.673	21.587
11	Kalena	5.767	5.646	11.413
<b>Jumlah</b>		142.679	134.809	277.488

**Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur**

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data  
BPS (badan pusat statistik) mencapai jumlah 277.488 jiwa dengan

jumlah rumah tangga sebanyak 68.872 rumah tangga, Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Malili sebesar 40.188 jiwa.

Kepadatan penduduk tahun 2014 di Luwu Timur mencapai 40 jiwa/ km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan 296 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Luwu Timur sebesar 105,84 yang artinya setiap 100 perempuan di Luwu Timur terdapat sekitar 106 laki-laki.

#### **4. Visi Misi Kabupaten Luwu Timur**

Visi dari Kabupaten Luwu Timur adalah “ Keberlanjutan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public di Kabupaten Luwu Timur menuju kabupaten agro industri tahun 2015”.

Dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang sebaik-baiknya
2. Memperkuat kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia di daerah untuk dapat menjadi handal, berdayaguna, berhasilguna untuk selanjutnya dapat meningkatkan partisipasi dalam kemajuan daerah

3. Menjaga suasana kebersamaan antar komponen warga agar tetap harmonis, tertib dan aman guna menunjang hidup dan kehidupan masyarakat yang lebih maju dan bermartabat dalam kesesuaian tatanan nilai-nilai budaya luhur dan tuntunan agama
4. Melanjutkan momentum dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memperluas aksesibilitas dan meningkatkan daya saing daerah untuk mengantisipasi perkembangan situasi perekonomian nasional dan internasional, melalui industrialisasi perdesaan dan agroindustri.

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Wotu**

### **1. Keadaan Geografis**

Kecamatan Wotu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayahnya 130,52 km<sup>2</sup> atau meliputi 1,88 persen dari luas Kabupaten Luwu Timur. Secara administrasi Wotu terbagi menjadi 16 desa yaitu, Desa Lera, Bawalipu, Lampenai, Bahari, Kalaena, Karambua, Kanawatu, Maramba, Tarengge, Cendana Hijau, Balo-Balo, Pepuro Barat, Rinjani, Madani, Tarengge Timur dan Tabaroge. Secara Geografis Kecamatan Wotu terletak di sebelah barat ibukota Kabupaten Luwu Timur tepatnya terletak diantara 2° 31' 58" - 2° 39' 57" Lintang Selatan dan 120° 45' 20" - 120° 55' 38" Bujur Timur.

Kecamatan Wotu berbatasan dengan Kecamatan Tomoni di sebelah utara, Kecamatan Angkona sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Burau. Kecamatan Wotu terdiri dari 16 desa yang seluruhnya berstatus desa definitif dengan 77 dusun dan 191 RT. Sebagian wilayah Kecamatan Wotu merupakan daerah pesisir. Lima dari 16 desanya merupakan wilayah pantai dan 11 desa merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Wotu merupakan daerah datar, karena keenam belas desanya merupakan daerah datar dan tidak ada yang daerah yang tergolong daerah berbukit-bukit.

**Tabel 1: Luas wilayah menurut Desa di Kecamatan Wotu**

No	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas kecamatan (%)
1	Lera	3,68	2,82
2	Bawalipu	20,03	15,35
3	Lampenai	22,31	17,09
4	Bahari	5,90	4,52
5	Kalaena	11,70	8,96
6	Karambua	4,53	3,47
7	Kanawatu	3,23	2,47
8	Maramba	6,08	4,66
9	Tarengge	9,14	7,00
10	Cendana hijau	3,64	2,79
11	Balo-balo	12,76	9,78
12	Pepuro Barat	2,61	2,00

13	Rinjani	6,00	4,60
14	Madani	2,66	2,04
15	Tarengge Timur	8,25	6,32
16	Tambaroge	8,00	6,13
<b>Jumlah</b>		<b>130,52</b>	<b>100</b>

**Sumber : data kecamatan wotu**

Desa Lampenai merupakan wilayah desa terluas dengan luas wilayah 22,31 km<sup>2</sup> atau sekitar 17,09% dari luas wilayah kecamatan Wotu. Kemudian disusul desa lainnya dan yang terkecil adalah desa Pepuro Barat dengan luas wilayah 2,61 km<sup>2</sup> atau 2,00% dari luas wilayah kecamatan Wotu.

**Gambar 1. Peta wilayah Kecamatan Wotu**



**Sumber; Data Kecamatan Wotu**

## 2. Demografi

Kepadatan penduduk di Kecamatan Wotu tergolong tinggi yaitu sekitar 233 orang per kilometer persegi, jauh berada di atas

rata-rata Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur yaitu sebanyak 40 orang per kilometer persegi. Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Lera 670 orang/km<sup>2</sup>, sedang paling rendah adalah Desa Balo-Balo dengan kepadatan sebanyak 81orang/km<sup>2</sup>. Pada tahun 2014, jumlah penduduk di Kecamatan Wotu sebanyak 30.396jiwa yang terbagi ke dalam 6.886 rumah tangga, dengan dengan rata-rata penduduk dalam satu rumah tangga sebanyak 4 orang. Rasio jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dengan laki-laki. Jumlah Penduduk laki-laki sebanyak 15.309 orang dan perempuan sebanyak 15.087 orang, sehingga rasio jenis kelaminnya sebesar 101 yang artinya dari 100 wanita terdapat sekitar 101 orang laki-laki.



**Tabel 2 : Tingkat kepadatan penduduk menurut desa di kecamatan wotu tahun 2014**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Kepadatan (orang/Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Banyaknya rumah tangga</b>
1	Lera	3,68	2.466	670	618
2	Bawalipu	20,03	6.491	324	1.281
3	Lampenai	22,31	5.147	231	1.287
4	Bahari	5,90	760	129	184
5	Kalaena	11,70	1.128	106	308
6	Karambua	4,53	1.145	253	287
7	Kanawatu	3,23	1.343	416	263
8	Maramba	6,08	1.148	189	286
9	Tarengge	9,14	1.636	179	328
10	Cendana hijau	3,64	2.115	581	427
11	Balo-balo	12,76	1.038	81	260
12	Pepuro Barat	2,61	768	294	152
13	Rinjani	6,00	1.320	220	326
14	Madani	2,66	1.292	486	321
15	Tarengge Timur	8,25	1.553	188	318
16	Tambaroge	8,00	938	117	240
<b>Jumlah</b>		<b>130,52</b>	<b>30.396</b>	<b>233</b>	<b>6.886</b>

**Sumber : data kecamatan wotu**

### **3. Visi dan Misi Kecamatan Wotu**

Kecamatan Wotu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, tentulah membutuhkan strategi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sehingga di semua bidang pemerintahan dan pembangunan bisa terlaksana dengan baik sesuai yang diinginkan. Maka untuk memperjelas suatu strategi demi terwujudnya pembangunan, arah pembangunan itu harus dirumuskan dalam suatu bentuk Visi dan Misi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin dicapai dalam dalam suatu kurun waktu tertentu, supaya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terarah dengan baik. Adapun yang menjadi visi dan misi Kecamatan Wotu, adalah:

Visi : Mewujudkan pelayanan prima dalam membentuk masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera yang dilandasi dengan profesionalisme dan kepribadian yang kokoh.

Adapun misi Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat yang kompeten dan harmonis, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, kebebasan berserikat.
2. Terwujudnya masyarakat yang kompeten dan penduduk yang terarah dan terkendali.

3. Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan dan pelayanan perekonomian, ketentraman dan ketertiban, dalam pembangunan masyarakat pedesaan.

### **C. Kewenangan Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

#### **1. Kewenangan Camat**

Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati. Secara rinci kewenangan Camat dijelaskan dalam pasal 226 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa:

“Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota”.<sup>25</sup>

Berdasarkan ayat ini seorang Camat mendapat kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh Bupati/walikota, untuk menangani sebagian urusan otonom daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

---

<sup>25</sup> Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 ayat (1) tertuang beberapa tugas pokok camat:

- a) “Menyeleggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6)
- b) Mengordinasikan kegiatan pemberdayaa masyarakat
- c) Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d) Mengordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada
- e) Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f) Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>26</sup>

Dari uraian diatas dengan jelas menunjukkan bahwa Camat diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas pokok yang telah diatur oleh undang-undang, hal ini sesuai dengan konsep teori yang

---

<sup>26</sup> Undang-undang No. 09 Thn 2015 tentang Pemerintahan Daerah

dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo yang berpendapat bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.<sup>27</sup>

Kemudian dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1), Tugas Camat dalam pemerintahan meliputi:

- a) “Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

---

<sup>27</sup> Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, edisi revisi ilmu administrasi, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1995 hal 78.

g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan”.<sup>28</sup>

Dari uraian diatas dengan jelas mengemukakan bahwa salah satu yang menjadi kewenangan camat adalah mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

PERDA Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, lebih rinci menjelaskan tentang kewenangan Camat. Perda Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (3) a, menyatakan bahwa salah satu yang menjadi kewenangan Camat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berikut beberapa yang menjadi kewenangan Camat menurut Perda Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008, meliputi:

- a) “mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d) Mengkorrdinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

---

<sup>28</sup> PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan desa
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dan desa”.<sup>29</sup>

Hasil wawancara dengan Camat Wotu, Awaluddin Anwar,S.STP mengungkapkan bahwa:

“pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu Kewenangan Camat tapi sifatnya hanya sebatas koordinasi dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat”.<sup>30</sup>

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menunjukkan bahwa Camat selaku pemimpin kecamatan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan program-program dari instansi-instansi lainnya. Salah satu program atau kegiatan dari pemerintah daerah yang harus dikoordinasikan oleh Camat selaku pimpinan

---

<sup>29</sup> Perda Kabupaten Luwu Timur No 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Camat Wotu, Awaluddin Anwar 2 februari 2016.

kecamatan adalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Camat sebagai pimpinan diwilayah tersebut dituntut harus melaksanakan kewenangannya dengan baik dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hasil wawancara dengan asisten I (satu) Bupati Luwu Timur, Drs. Budiman, M.pd mengemukakan bahwa:

“Camat diberi kewenangan oleh Bupati untuk melihat, memonitoring, merencanakan, dan mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Jadi Camat harus banyak mendengarkan dan memperhatikan masyarakatnya, agar masyarakat bisa berdaya”.<sup>31</sup>

Dari uraian diatas dengan jelas mengungkapkan bahwa camat dituntut agar dapat melihat, memonitoring, dan mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakatnya, camat juga dituntut untuk dapat memberdayakan masyarakatnya. Dengan diberikannya kewenangan ini Camat diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Adanya kewenangan Camat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang menuntut camat lebih proaktif dalam menindaklanjuti pola pembangunan yang bersifat partisipatif. Hasil wawancara dengan Camat Wotu mengenai program-program

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Asisten I Bupati Luwu Timur, Drs. Budiman, M.pd. 1 februari 2016



pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Wotu, Awaluddin Anwar, S.STP mengungkapkan bahwa:

“ada beberapa program pemberdayaan masyarakat yang saat ini masih berjalan yaitu peningkatan usaha kecil menengah (ukm), SPP (simpan pinjam perempuan), bedah rumah, selebihnya itu masing-masing desa yang menentukan program-program pemberdayaan apa saja yang dibutuhkan masyarakat”.<sup>32</sup>

Penetapan program tersebut tentu tidak terlepas dari peran Camat sebagai koordinator wilayah dalam memberikan dorongan, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi kinerja dari semua perangkat yang terkait untuk menciptakan sistem yang partisipatif dalam pembangunan. Adanya program-program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang ada di kecamatan Wotu, khususnya masyarakat yang kurang mampu (miskin). Dari data yang didapat di lapangan selama penelitian oleh penulis, ditunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan Wotu, masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya keluarga pra-sejahtera yang mencapai 2.325 keluarga.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Camat Wotu, Awaluddin Anwar, S.STP. 2 februari 2016

**Tabel 1. Banyaknya keluarga prasejahtera, Sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, dan sejahtera III plus**

<b>Desa</b>	<b>Keluarga pra- sejahtera</b>	<b>Sejahtera I</b>	<b>Sejahtera II</b>	<b>Sejahtera III</b>	<b>Sejahtera III plus</b>
Lera	148	139	113	222	13
Bawalipu	479	193	312	557	21
Lampenai	346	490	117	270	5
Bahari	92	55	0	40	0
Kalaena	147	51	8	100	3
Karambua	75	81	13	105	0
Kanawatu	108	68	42	141	0
Maramba	101	33	60	118	0
Tarengge	122	72	33	139	0
Cendana Hijau	124	47	39	32	0
Balo-balo	117	26	34	355	0
Pepuro Barat	23	33	16	121	13
Rinjani	182	84	38	20	0

Madani	148	63	43	92	0
Tarengge Timur	75	100	100	48	0
Tabaroge	38	40	62	112	0
<b>Jumlah/total</b>	<b>2.325</b>	<b>1.575</b>	<b>1.030</b>	<b>2.472</b>	<b>55</b>

**Sumber: data Kecamatan Wotu**

Desa bawalipu merupakan desa dengan tingkat kesejahteraan masyarakat paling rendah dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada dikecamatan Wotu. Dengan jumlah keluarga pra-sejahterah 479 keluarga dari total keseluruhan 2.325 keluarga pra-sejahterah yang ada di kecamatan Wotu, disusul di urutan kedua (2) yaitu desa Lampenai dengan jumlah keluarga pra-sejahterah 346 keluarga. Adapun desa dengan jumlah keluarga pra-sejahterah paling rendah atau kecil adalah desa Cendana Hijau, dengan jumlah 23 keluarga pra-sejahterah. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan Wotu masih sangat rendah.

Adapun beberapa contoh program pemberdayaan masyarakat yang ada di beberapa desa di kecamatan Wotu yang berhasil diperoleh oleh penulis selama penelitian, meliputi:

**Tabel1. Program-program pemberdayaan masyarakat Desa Bawalipu**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	RP. 17.200.000,00
2	Kegiatan pemuda dan olahraga (karang taruna)	Rp. 8.000.000,00
3	Kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dan BPD	Rp. 8.200.000,00
4	Bedah rumah KK miskin (22 unit)	Rp. 133.056.700,00
5	Kegiatan pembinaan pengelola perpustakaan desa	Rp. 15.200.000,00
6	Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana posyandu	Rp. 15.029.000,00

**Sumber; Data Desa Bawalipu**

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa progam-program pemberdayaan masyarakat desa Bawalipu, meliputi : kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK, kegiatan pemuda dan olahraga (karangtaruna), kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dan BPD, bedah rumah keluarga miskin, kegiatan pembinaan pengelola perpustakaan desa, dan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana posyandu.Kegiatan atau

program tersebut diharapkan dapat membantu dan berguna bagi masyarakat.

Dari keenam kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat diatas yang paling menyentuh masyarakat kelas bawah atau kurang mampu adalah program bedah rumah keluarga miskin, ada 22 unit rumah warga yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah berharap dengan adanya bantuan bedah rumah ini masyarakat yang berhak atas bantuan ini, bisa terbantu dan merasa nyaman dengan keadaan rumah yang lebih layak huni dari pada sebelumnya.

**Tabel 1. Program-program pemberdayaan Desa Cendana Hijau**

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	Pembuatan jamban sehat untuk keluarga miskin (30 unit)	RP. 75.000.000,00
2	Kegiatan bedah rumah bagi keluarga miskin (12 unit)	Rp. 60.000.000,00
3	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	Rp. 19.000.000,00
4	Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	Rp. 10.000.000,00
5	Kegiatan pemberdayaan kader posyandu	Rp. 10.200.000,00
6	Kegiatan pembinaan keagamaan	Rp. 17.620.000,00

**Sumber; data Desa Cendana Hijau**

Dari tabel program-program pemberdayaan desa Cendana Hijau, meliputi: pembuatan jamban sehat, kegiatan bedah rumah, kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK, kegiatan

pembinaan organisasi kepemudaan, kegiatan pemberdayaan kader posyandu, kegiatan pembinaan keagamaan. Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat dapat mandiri dan berdaya, karena itu pemerintah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat tersebut bisa berguna dan diandalkan.

**Tabel 1. Program-program pemberdayaan masyarakat Desa Balo-balo**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	RP. 11.000.000,00
2	Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	Rp. 4.000.000,00
3	Kegiatan pembinaan kader posyandu	Rp. 6.000.000,00
4	Kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dan BPD	Rp. 25.000.000,00
5	Kegiatan pengembangan perpustakaan dan minat baca di desa	Rp. 3.430.000,00
6	Kegiatan pemberdayaan kelompok tani rumput laut	Rp. 25.000.000,00

**Sumber; data Desa Balo-balo**

Program-program pemberdayaan masyarakat desa Balo-balo, meliputi : kegiatan pembinaan organisasi perempuan, kegiatan organisasi kepemudaan, kegiatan pembinaan kader posyandu, kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah desa dan BPD, kegiatan pengembangan perpustakaan dan minat baca di desa, kegiatan pemberdayaan kelompok tani rumput laut.

Sebagian penduduk desa Balo-balo bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut, pemerintah desa merasa bahwa masyarakat sekitar perlu diberdayakan khususnya untuk petani rumput laut, karena dampaknya bagi masyarakat cukup besar selain masyarakat bisa mandiri, juga dapat menambah penghasilan masyarakat itu sendiri. Sayangnya sebagian petani rumput laut yang ada di desa Balo-balo tidak telaten dalam menjaga kualitas hasil panen mereka sehingga para pembeli semakin berkurang dan harganya juga semakin murah. Maka pemerintah desa berinisiatif untuk memberdayakan kelompok tani rumput laut dengan mendatangkan tenaga pendamping, agar kualitas dan hasil rumput laut masyarakat lebih baik (berkualitas) dan harga jualnya bisa lebih tinggi lagi.

**Tabel 1. Program-program pemberdayaan masyarakat desa Lera**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Pengadaan kandang jepit ternak	RP. 500.000,00
2	Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana posyandu	Rp. 16.000.000,00
3	Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	Rp. 7.400.000,00
4	Bedah rumah KK miskin (24 unit)	Rp.136.570.000,00
5	Kegiatan pembinaan pengelola perpustakaan desa	Rp. 15.200.000,00

**Sumber; data Desa Lera**

Desa Lera sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, desa Lera merupakan salah satu desa dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak di kecamatan Wotu. Program-program pemberdayaan masyarakat desa Lera, meliputi : Pengadaan kandang jepit ternak, kegiatan peningkatan sarana dan prasarana posyandu, kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK, bedah rumah keluarga miskin, dan kegiatan pembinaan pengelola perpustakaan desa. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan masyarakat bisa lebih terlatih serta lebih mandiri lagi, begitu pun dengan program bedah rumah diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang mendapat bantuan perbaikan rumah.

Berdasarkan hasil analisis program-program pemberdayaan di beberapa desa di kecamatan Wotu, meliputi; desa Bawalipu, Cendana Hijau, Balo-balo, dan Lera, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK di desa Cendana Hijau mempunyai anggaran lebih besar dibandingkan dengan desa lainnya sebesar Rp. 19.000.000, desa Bawalipu sebesar Rp. 17.200.000, desa Balo-balo sebesar Rp. 11.000.000. hal ini disebabkan karena belanja barang dan jasa di tiap-tiap desa berbeda.



Untuk kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan desa Cendana hijau mempunyai anggaran lebih besar dibandingkan dengan desa lainya sebesar Rp. 10.000.000, desa Bawalipu sebesar Rp. 8.000.000, desa Lera sebesar 7.400.000, dan desa Balo-balo sebesar Rp. 4.000.000. hal ini disebabkan karena jumlah belanja barang dan jasa di desa Cendana Hijau lebih besar, untuk desa Cendana hijau belanja barang dan jasa, meliputi; belanja kostum sepak bola, kostum volly putra dan putri, makan dan minum kegiatan, transportasi kegiatan, dan peralatan olahraga. Untuk desa Bawalipu, meliputi: kostum olahraga, kosumsi, dan perlengkapan olahraga. Untuk desa Lera, meliputi : kostum sepak bola, perlengkapan olahraga, transportasi, dan konsumsi. Untuk desa Balo-balo, meliputi : konsumsi dan peralatan dan perlengkapan olahraga.

Untuk kegiatan bedah rumah bagi keluarga miskin desa Lera mempunyai anggaran lebih besar dari desa lainnya sebesar Rp. 136.570.000, desa Bawalipu sebesar Rp. 133.000.000, dan desa cendana Hijau sebesar Rp. 60.000.000. hal ini disebabkan karena jumlah belanja modal, barang dan jasa serta jumlah unit rumah yang akan dibedah. Untuk Lera sebesar 24 unit, desa Bawalipu 22 unit, dan desa Cendana Hijau 12 unit.

Untuk kegiatan pembinaan kader posyandu desa Lera mempunyai anggaran lebih besar dari desa lainnya sebesar Rp.

16.000.000, desa Bawalipu sebesar Rp. 15.029.000, desa Cendana Hijau sebesar Rp. 10.200.000, desa Balo-balo sebesar Rp. 6.000.000. hal ini dikarenakan belanja barang dan jasa masing-masing desa berbeda, jumlah kader posyandu masing-masing desa juga berbeda, serta kebutuhan tiap-tiap desa yang berbeda seperti konsumsi dan peralatan posyandu.

Camat Wotu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat selain berperan sebagai kepala wilayah, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan desa, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan dan desa. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 Ayat (1)a, menyatakan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun yang menjadi tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dijelaskan pada Pasal 16 Ayat (1), meliputi;

- a) “Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai

program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan

- c) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- d) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat”.<sup>33</sup>

#### **D. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat**

##### **1. Mendorong Partisipasi Masyarakat**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 225 Ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa Camat mempunyai tugas mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal serupa juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pasal 15 Ayat(1)huruf a yang menyatakan bahwa salah satu tugas Camat adalah mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>33</sup> PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Camat Wotu mempunyai tugas pokok yang sudah diamanahkan oleh Undang-undang yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, Pasal 5 Ayat (3) huruf a menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Camat adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meskipun sifatnya hanya sebatas koordinasi.

Salah satu tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberi dorongan kepada masyarakat agar ikut serta dalam forum Musrembang di desa/kelurahan dan Kecamatan, Musrembang Kecamatan merupakan forum musyawarah stakeholders Kecamatan, untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan dan menyepakati kegiatan kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) kabupaten untuk tahun berikutnya.

Pelaksanaan Musrembang tingkat Kecamatan dihadiri dari berbagai kalangan yaitu dari perwakilan sejumlah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota, unsur aparat kecamatan, Desa, LSM, Tokoh Masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang mewakili individu maupun kelompok yang peduli terhadap pembangunan.

Tujuan dari pelaksanaan musrembang adalah membahas dan menyepakati hasil-hasil musrembang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan diwilayah kecamatan, adapun isi dari tujuan pelaksanaan musrembang yaitu membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan dan melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Camat selaku pimpinan pemerintahan di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab dalam kegiatan musrembang mempunyai andil dalam mendorong partisipasi masyarakat agar ikut serta dalam forum musrembang ditingkat desa/kelurahan dan ditingkat kecamatan, ini dilihat dengan kehadiran masyarakat sendiri dalam mengadiri kegiatan yang diadakan tersebut. Upaya-upaya dalam mendorong masyarakat agar mau berpartisipasi telah dilakukan, hal tersebut dikatakan dalam hasil wawancara dengan Awaluddin Anwar,S.STP yang mengatakan bahwa:

“saya sebagai camat disini selalu berupaya mendorong masyarakat agar selalu ikut serta dalam segala macam kegiatan musyawarah dan masyarakat antusias, masyarakat juga bisa menerima program-program yang kami berikan, kami juga selalu mengingatkan kepada masyarakat apapun program-program yang kami berikan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya”.<sup>34</sup>

Camat dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan di Kecamatan Wotu selalu berupaya agar masyarakat bisa terlibat langsung dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat. Camat selalu melakukan komunikasi dengan aparat pemerintahan desa mengenai program-program pemberdayaan dari kabupaten, kemudian desa meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat, karena desa dianggap paling dekat secara langsung kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan salah satu Tokoh masyarakat yang ada dikecamatan Wotu, Nover Wangu mengungkapkan bahwa:

“sangat terlihat masyarakat menyambut dengan baik, sebagai contoh masyarakat masih antusias dalam hal gotong royong, pembuatan lorong-lorong. Masyarakat selalu terlibat langsung dalam membantu pemerintah”.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Camat Wotu, Awaluddin Anwar, S.STP. 2 februari 2016

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Nover Wangu 12 Februari 2016

Hasil wawancara yang sama juga disampaikan LSM yang ada di kecamatan Wotu, Suryo mengungkapkan bahwa:

“masyarakat sangat antusias, masyarakat juga merespon dengan baik setiap program-program yang ada. Masyarakat juga selalu berusaha membantu pemerintah, karena masyarakat disini jiwa kegotong royongannya masih sangat tinggi”.<sup>36</sup>

Adapun masalah yang dihadapi oleh camat dan desa dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah dengan masih banyaknya masyarakat yang belum terlalu memahami akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri. Hasil wawancara dengan kepala desa Balo-balo, Rustam Bahar mengatakan bahwa:

“ini juga yang menjadi salah satu kendala yang kami hadapi, kurangnya kesadaran masyarakat di dalam mengikuti yang namanya program-program pemberdayaan itu, mereka belum terlalu mau memahami hal semacam itu, jadi untuk sementara bisa dibbilang masyarakat belum sadar akan pentingnya program-program tersebut”.<sup>37</sup>

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan camat dan desa dalam mendorong masyarakat agar mau

---

<sup>36</sup> Hasil wawncara dengan LSM, Suryo 9 Februari 2016

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan kepala desa balo-balo, Rustam Bahar 5 februari 2016



berpartisipasi dalam proses pembangunan kecamatan masih menjadi permasalahan yang perlu dicari pemecahannya.

Sebagai koordinator diwilayah kerjanya, Camat Wotu dalam rangka menjalankan kewenangannya terkait mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitian ditemukan adanya sistem koordinasi yang dibangun sangat efektif. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai koordinator wilayah telah ditetapkan dalam kalender pemerintahan kecamatan Wotu bahwa setiap bulannya diadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut semua pihak-pihak terkait yang hadir yaitu: semua kepala desa, instansi vertikal, polsek, dandramil, tokoh masyarakat, dan LSM.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan tiap bulan tersebut dibahas berbagai aspek permasalahan. Selain rapat koordinasi ini wadah mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan juga ,menjadi wadah pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kepala-kepala desa yang terkait dengan kewenangan Camat terhadap desa maupun perangkat pemerintahan lainnya.

Rapat koordinasi ini sebagai wadah dalam rangka mensinkronisasikan segala bentuk permasalahan di desa. Kesatuan persepsi dan tindakan yang mempunyai akibat-akibat

hukum, serta menghindari adanya kegiatan-kegiatan pemerintahan yang keliru karena kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi. Selain itu rapat koordinasi ini merupakan inisiatif Camat wotu untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam kedisiplinan yang teratur disemua perangkat pemerintahan yang ada di kecamatan wotu. Koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan satuan-satuan, pekerjaan-pekerjaan, dan orang-orang dapat bekerja secara tertib dan sarana menuju kearah tercapainya tujuan tanpa terjadi kekacauan, penyimpangan, percecokan, dan kekosongan kerja. Hal ini sesuai dengan konsep teori yang dikemukakan oleh G.R Terry bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang singkron/teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditetapkan.<sup>38</sup>

Koordinasi dengan desa sangat diperlukan agar program-program yang direncanakan oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Koordinasi antara camat dan desa harus berjalan baik, karena tanpa adanya komunikasi yang baik, maka program-program yang direncanakan tidak akan terlaksana sesuai seperti yang diharapkan. Hasil wawancara dengan Awaluddin Anwar,S.STP mengatakan bahwa:

---

<sup>38</sup> Taliziduhu Ndraha,Kybernology(ilmu pemerintahan) buku 1,jakarta;Rineka Cipta,cet kedua,2011 hal 290.

“saya sebagai camat tetap melakukan komunikasi atau koordinasi dengan desa, dengan melakukan rapat koordinasi tiap bulannya, adapun masalah-masalah yang dihadapi kita komunikasikan dengan desa kemudian kita mencari solusi dari masalah-masalah tersebut”.<sup>39</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh beberapa kepala desa yang ada dikecamatan wotu, dari hasil wawancara dengan salah satu kepala desa yang ada dikecamatan wotu, Ramli mengatakan bahwa:

“baik, kenapa saya katakan baik karena itu sudah rutin dilakukan tiap tanggal 17, upacara bendera sekaligus dengan rapat koordinasi, jadi koordinasi antara camat dan desa tidak pernah putus”.<sup>40</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh sekretaris desa pepuro barat, yang mengatakan bahwa:

“koordinasi rutin dilaksanakan tanggal 17 tiap bulannya, biasanya kalau ada hal-hal yang sangat mendesak kami langsung menemui camat, kadang melalui telepon kadang langsung kekantornya berhadapan langsung”.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Camat Wotu, Awaluddin Anwar, S.STP 2 februari 2016

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan kepala desa Lera, Ramli 5 februari 2016

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Sekdes Pepuro Barat, Ni Ketut Subawa 4 februari 2016

Hasil wawancara diatas dapat menjadi bukti bahwa koordinasi yang dilakukan Camat Wotu terhadap kepala desa dan pihak-pihak terkait lainnya terjalin dengan harmonis dan baik.

## **2. Melakukan pembinaan dan pengawasan**

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan camat untuk mampu mencapai tujuan bersama. Adapun melakukan pembinaan yang dimaksud adalah dengan dilakukannya macam-macam pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat dalam rangka mengenali potensi-potensi yang ada di lingkungan masyarakat ataupun potensi yang ada di diri masyarakat. Disini peran camat yang bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya dengan baik, bagaimana dengan pembinaan dan pelatihan yang diadakan tersebut mampu membawa potensi masyarakat lagi berkembang dan dapat di dayagunakan.

Melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan kepada masyarakat, Camat senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Seperti di kecamatan Wotu, Camat selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah apabila ada kegiatan pelatihan kepada masyarakat karena camat selaku kepala pemerintahan yang ada di kecamatan juga sebagai penyambung tugas antara pemerintah daerah dengan kecamatan.

Banyak manfaat yang didapat dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Sebagai contoh, pelatihan terhadap kader-kader posyandu, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pengelolaan anak usia dini. Salah satu program pelatihan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di kecamatan Wotu adalah pembuatan kripik singkong, masyarakat melakukan pelatihan selama satu bulan dalam proses pembuatan kripik singkong.

Tujuan utamanya adalah memperkenalkan kepada masyarakat potensi-potensi alam dan potensi manusia yang ada dilingkungan tempat tinggal yang tanpa disadari oleh masyarakat telah mampu menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan tidak dipungkiri hasil tersebut dapat berpengaruh pada tingkat penghasilan dan kemandirian masyarakat yang jadi meningkat. Hasil wawancara dengan Camat Wotu, mengatakan bahwa:

“dilakukan training selama 1 (satu) bulan, tapi sekarang mereka sudah berjalan secara individu atau sendiri-sendiri, adapun masalah yang dihadapi adalah bahan baku kalau peralatan sudah ada. Masalah berikutnya adalah masalah produksinya, beberapa waktu yang lalu BUMD ingin mengambil alih Cuma tidak tahu

bagaimana sehingga itu tidak berjalan juga, tapi mereka tetap survive, tetap bertahan untuk usaha itu”.<sup>42</sup>

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Nover Wangu mengatakan bahwa:

“disini sudah banyak masuk hal-hal yang kami lihat, upaya dari pemerintah terhadap program-program tersebut. antara lain pembinaan kader-kader posyandu, kemudian beberapa hal yang dimunculkan oleh organisasi pemuda dan tokoh masyarakat dalam hal membantu pemerintah, saya fikir sudah ada efek positif dari pemberdayaan itu sendiri”.<sup>43</sup>

Terlepas dari uraian diatas, bahwa tugas camat dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, agar dapat dihasilkannya manfaat yang berguna untuk masyarakat.

Camat dalam menjalankan tugasnya tidak berperan sendiri tetapi didampingi mitra kerjanya yang ada di desa/kelurahan dan yang utama adalah pembimbing yang telah ahli dibidangnya yang mampu memberikan informasi yang berguna untuk masyarakat dan memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami tujuan dari pembangunan daerah.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Camat Wotu, Awaluddin Anwar, S.STP 2 februari 2016

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat, Nover Wangu 12 februari 2016

Selain melakukan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Camat juga mempunyai tugas sebagai pengawas dalam kegiatan kemasyarakatan, pengawasan dilakukan dengan tujuan melihat segala kegiatan yang berjalan dilingkungan masyarakat agar berjalan dengan baik. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan baik dan hasilnya pun dapat diterima bahkan dirasakan oleh masyarakat yang ada di kecamatan wotu.

### **3. Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat**

Salah satu tugas camat dalam memimpin pemerintahan yang ada di kecamatan yaitu melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang berguna dalam memberikan umpan balik bagi pihak terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, hasil wawancara dengan asisten I (satu) Bupati, Drs. Budiman, M.Pd mengatakan bahwa:

“ada beberapa program-program yang digelontorkan oleh pemerintah daerah, ada dana stimulan dan dana bantuan infrastruktur pedesaan. Ini juga diberikan kepada camat untuk

dilakukan evaluasi dan monitoring, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat”.<sup>44</sup>

Senada dengan yang diungkapkan asisten I (satu) bupati dalam hasil wawancara dengan Camat Wotu, Awaluddin Anwar, S.STP mengungkapkan bahwa:

“ tidak hanya camat saja yang melakukan evaluasi tetapi bupati dan pihak pemerintah daerah juga ikut mengevaluasi. Semua hasil evaluasi yang ada langsung saya laporkan ke bupati”.<sup>45</sup>

Hal serupa juga dibenarkan oleh sekretaris desa Pepuro Barat yang mengungkapkan bahwa:

“Camat mempunyai peran memonitoring, mengevaluasi, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan di kecamatan, khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat rutin dilakukan tiap bulan”.<sup>46</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan atau program-program yang diberikan kepada masyarakat sudah menjadi tanggungjawab pemerintah setempat. Diharapkan agar semua kegiatan tetap berada di koridor yang telah ditetapkan dan diharapkan tidak menyimpang dari pelaksanaan kegiatan.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Asisten I Bupati Luwu Timur, Drs. Budiman, M.Pd 1 februari 2016

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Camat Wotu, Awaluddin Anwar, S.STP 2 februari 2016

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Sekdes Pepuro Barat, Ni Ketut Subana 4 ferbruari 2016



Tahap evaluasi biasanya juga dalam bentuk laporan yang ada di lapangan yang kemudian dapat dilihat dengan jelas bagaimana hasil dari pada pelaksanaan pembangunan yang telah di jalankan. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk laporan tersebut, untuk pertanggungjawabannya di sampaikan kepada bupati kemudian dilakukan rapat-rapat dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan.

**E. Hal-hal yang Mempengaruhi Kewenangan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wotu**

**1. Kemampuan Camat Dalam Memimpin**

kepemimpinan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi, pimpinan merupakan seseorang yang mengarahkan suatu aktifitas yang ada di sebuah organisasi dan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap bawahan dan sumberdaya organisasi lainnya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Seorang pemimpin merupakan orang yang harus berani mengambil keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi organisasi. Pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, haruslah memahami arti dan sasaran yang hendak dicapai agar dapat memajukan serta meningkatkan kerja bawahannya.

Seorang pemimpin juga dituntut agar selalu dapat menjalankan tugas ataupun kewajibannya dengan baik.

Kemampuan Camat dalam memimpin merupakan salah satu komponen utama yang mempengaruhi kinerja seseorang dalam pengelolaan suatu kegiatan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan yang dimiliki seseorang maka pola pikir serta pemahaman terhadap tugas dan fungsinya akan dengan sangat mudah untuk diterapkan.

Kemampuan memimpin camat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar berjalan dengan baik, tanpa tanggung jawab yang tinggi oleh camat maka tidak akan terlihatnya hasil pembangunan yang merata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai yang ada di kecamatan wotu. Tingkat kemampuan camat dalam melaksanakan tugasnya dikatakan sudah baik. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara dengan seksi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Samuel mengungkapkan bahwa:

“menurut saya kemampuan beliau sangat baik, beliau memiliki wawasan dan dalam memecahkan masalah beliau melakukannya dengan baik”.<sup>47</sup>

Hasil wawancara diatas didukung dengan pernyataan Sekdes bawalipu, yang mengatakanbahwa:

“menurut saya kepemimpinan camat wotu cukup baik, itu dapat dilihat dengan seringnya beliau melakukan komunikasi dengan pemerintah desa khususnya dengan desa bawalipu sendiri”.<sup>48</sup>

Hasil wawancara dengan kepala desa Lera, Ramli Mengatakan bahwa:

“selama saya jadi kepala desa, pak Camat selalu melakukan tugasnya dengan baik, Camat selalu datang ke desa untuk berkoordinasi langsung bila ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang ada di desa Lera”.<sup>49</sup>

Hasil wawancara lainnya dengan LSM yang ada di kecamatan Wotu, mengatakan bahwa:

“Cukup baik, pak Camat selama ini melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan desa, tokoh masyarakat, dan

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan seksi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Samuel 2 februari 2016

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan sekdes Bawalipu, Yogi Pratama 7 februari 2016

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan kepala desa Lera, Ramli 5 februari 2016

termasuk LSM juga, jadi bisa dilihat kalau kepemimpinan camat Wotu itu cukup baik”.<sup>50</sup>

Hasil wawancara dengan desa lainnya, mengungkapkan hal yang sama, Sekdes Balo-balo mengatakan bahwa:

“cukup baik, camat sering datang langsung bertemu dengan kami, berkoordinasi langsung bila ada hal-hal yang penting, atau sebaliknya kami biasa yang datang menemui pak Camat dikantornya dan Camat selalu menerima kami dengan baik”.<sup>51</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Wotu, mengatakan bahwa:

“tentu saja baik, camat selalu terjun langsung bertemu dengan pemerintah desa, adapun informasi-informasi atau kegiatan dari kabupaten Camat datang sendiri menyampaikannya ke desa, lalu desa meneruskannya ke dusun-dusun”.<sup>52</sup>

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kemampuan yang dimiliki camat wotu di katakan baik, ini dapat dilihat dari kemampuan camat dalam mengatasi masalah dan seringnya melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta LSM yang ada di kecamatan Wotu.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan LSM, Suryo 9 februari 2016

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Sekdes Balo-balo, Rustam Bahar 7 februari 2016

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Nover Wangu 12 februari 2016

## **2. Sarana dan Prasarana**

Camat dalam melakukan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dengan fasilitas yang camat dapatkan dari jabatannya sebagai kepala kecamatan yaitu dengan pengadaan mobil dinas, dengan fasilitas yang ada tersebut sudah membantu camat dalam melakukan tugasnya dengan mengkoordinasikan kepada para mitra kerja yang ada di desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Camat Wotu memerlukan sarana dan prasarana dalam menunjang dan membantu camat dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai koordinator diwilayah kecamatan Wotu. Yang dimaksud dengan sarana kerja adalah fasilitas secara langsung yang berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruang kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana kerja adalah fasilitas secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, seperti: gedung kantor, rumah jabatan, dan rumah instansi.

Hasil wawancara dengan seksi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa kecamatan Wotu, Samuel mengatakan bahwa:

“untuk sarana dan prasarana yang ada dikantor camat wotu bisa dibilang sudah memadai, seperti mobil dinas, laptop, ruang kerja, dan lain-lain itu sudah ada”.<sup>53</sup>

Dengan adanya fasilitas tersebut maka tidak ada alasan bagi camat untuk tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan lancar, sehingga dengan fasilitas tersebut dapat menjadi faktor utama camat dalam meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di setiap desa.

Selain prasarana/ fasilitas yang telah dimiliki oleh camat, sarana pendukung yang ada di desa pun sangat dibutuhkan dalam peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan wotu. Contohnya salah satu desa yang ada di kecamatan wotu, yaitu desa Balo-balo. Desa tersebut perlu mendapatkan perhatian dari Camat dan pemerintah daerah, adapun masalah yang dihadapi pemerintah desa Balo-balo yaitu dengan terkendalanya pembangunan infrastruktur untuk

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan seksi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Samuel 2 februari 2016

pembangunan desa. Hasil wawancara dengan kepala desa Balo-balo, mengungkapkan bahwa:

“kami sangat kesulitan dalam menentukan suatu lokasi pembangunan, itu sangat sulit karena untuk sekarang ini tidak lagi dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur untuk pembangunan desa, jadi itu yang menjadi kendala bagi kami. Salah satu contoh untuk pembangunan kantor BPD kami belum punya, karena masalah lahan. Pada tahun lalu kami sudah dianjurkan, tapi tiba-tiba di tahun 2016 ini Undang-undangnya berubah dan dilarang lagi menggunakan tanah sebagai kas desa”.<sup>54</sup>

Dari uraian diatas, dapat dilihat dengan masih banyak kendala yang dihadapi camat dan desa dalam hal sarana dan prasarana, permasalahan yang dihadapi desa Balo-balo perlu dicarikan solusi atau jalan keluar yang baik, agar pembangunan infrastruktur di desa-desa bisa merata.

### **3. Dukungan Anggaran**

Awal pemerintahan di kabupaten Luwu Timur, demi mempercepat pembangunan dan infrastruktur pemerintah daerah sudah mengucurkan dana yang cukup besar untuk pembangunan secara merata diseluruh wilayah yang ada di

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan kepala desa Balo-balo, Rustam Bahar 7 februari 2016

kabupaten Luwu Timur. Pemerintah kabupaten memberikan dana yang diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat dan desa. Adapun kucuran dana tersebut yaitu dana stimulan (dana yang diperuntukkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat), dan dana yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur. Hasil wawancara dengan asisten I (satu) bupati, Drs. Budiman, M.Pd mengatakan bahwa:

“pemerintah kabupaten Luwu Timur memberikan dana untuk pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar 200 juta rupiah, tujuannya supaya desa bisa membangun infrastruktur secara mandiri, dan dana 350 juta rupiah untuk dana stimulan, dana itu diperuntukkan bagi ukm-ukm dan itu bergulir di desa”.<sup>55</sup>

Hasil wawancara diatas didukung dengan pernyataan Camat Wotu, Awaluddin Anwar, S.STP mengungkapkan bahwa:

“dukungan anggaran pemberdayaan masyarakat ada tapi dana tersebut tidak langsung diberikan kepada masyarakat, dan camat hanya melakukan koordinasi seperti yang saya katakan sebelumnya cuma koordinatif”.<sup>56</sup>

Dengan adanya dukungan anggaran tersebut, pemerintah daerah berharap bisa membantu desa dan

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan asisten I Bupati Luwu Timur, Drs. Budiman, M.Pd 1 februari 2016

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan camat Wotu, Awaluddin Anwar, S.STP 2 februari 2016



masyarakat pada umumnya yang ada di kabupaten Luwu Timur.

Adapun beberapa contoh program bantuan keuangan pembangunan infrastruktur pembangunan pedesaan (BK-PIPP) yang ada di beberapa desa yang ada di kabupaten Luwu Timur yang berhasil diperoleh oleh penulis selama penelitian, meliputi;

**Tabel 3: Program BK-PIPP Kecamatan Wotu Desa Cendana Hijau**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Pembangunan proteksi di dusun Lembah Bahagia I dan II	Rp. 186.000.000,00
2	Biaya design RAB	Rp. 4.000.000,00
3	Biaya operasional	Rp.6.000.000,00
4	Biaya pengawasan	Rp.4.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 200.000.000,00</b>

**Sumber : Data BPMPD Kabupaten Luwu Timur**

Program BK-PIPP desa Cendana Hijau kecamatan Wotu adalah pembangunan proteksi di dusun Lembah Bahagia I (satu) dan dusun Lembah Bahagia II (dua) sebesar Rp 186.000.000, adapun biaya-biaya lainnya meliputi biaya design RAB sebesar Rp. 4.000.000, biaya operasional Rp. 6.000.000, biaya pengawasan Rp 4.000.000. jadi total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan proteksi di dusun Lembah Bahagia I dan II adalah

sebesar Rp. 200.000.000, hal ini sesuai dengan jumlah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur kepada masing-masing desa sebesar Rp. 200.000.000.

**Tabel 3 : Program BK-PIPP Kecamatan Wotu Desa Balo-balo**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Pembentukan badan jalan dan jembatan volume 1.680m	Rp. 1.000.000,00
2	Pembangunan jalan rabat beton dengan volume 170m	Rp. 1.000.000,00
3	Swadaya masyarakat	Rp. 500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 200.500.000,00</b>

**Sumber : Data BPMPD Kabupaten Luwu Timur**

Program bantuan keuangan pembangunan infrastruktur pembangunan pedesaan (BK-PIPP) desa Balo-balo kecamatan Wotu adalah pembentukan badan dan jembatan volume 1.680m sebesar Rp. 100.000.000, dan pembangunan jalan rabat beton dengan volume 170m sebesar Rp. 100.000.000, serta tambahan dana dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 500.000, hal ini disebabkan karena adanya tambahan biaya lain-lain, makanya masyarakat melakukan sumbangan sukarela demi pembangunan diwilayah mereka. Partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan demi terwujudnya pembangunan yang baik.

**Tabel 3 : Program BK-PIPP Kecamatan Wotu Desa Lampenai**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Perkerasan jalan	Rp. 75.373.000,00
2	Talud proteksi di dusun kau	Rp. 110.627.000,00
3	Biaya operasional kegiatan	Rp. 2.000.000,00
4	Biaya konsultan teknis	Rp. 3.000.000,00
5	Biaya pengawasan	Rp. 2.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 200.000.000,00</b>

**Sumber : Data BPMPD Kabupaten Luwu Timur**

Program bantuan keuangan pembangunan infrastruktur pembangunan pedesaan (BK-PIPP) desa Lampenai kecamatan Wotu adalah perkerasan jalan sebesar Rp. 75.373.000 dan talud proteksi di dusun Kau sebesar Rp. 110.627.000, adapun biaya-biaya lainnya meliputi biaya operasional kegiatan sebesar Rp. 2.000.000, biaya konsultan teknis sebesar Rp. 3.000.000, serta biaya pengawasan sebesar Rp. 2.000.000, jadi total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan perkerasan jalan dan talud proteksi di dusun Kau desa Lampenai adalah sebesar Rp.

200.000.000, jadi semua dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah terpakai habis.

Dari tabel diatas dapat dilihat komitmen pemerintah daerah dalam membangun daerah pedesaan di masing-masing desa yang ada di kabupaten Luwu Timur. Dengan adanya dana bantuan infrastruktur atau BK-PIPP sebesar Rp. 200.000.000, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan di desa mereka masing-masing, agar masyarakat dapat merasakan sendiri dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di kecamatan Wotu :

“dengan adanya perbaikan jembatan diwilayah kami, saya pribadi tentu merasa senang, jembatan yang dulu dengan yang sekarang sudah sangat jauh berbeda, dulu jembatannya terbuat dari kayu dan sudah rapuh dan jalannya juga sempit, tapi kalau sekarang jembatannya sudah bagus terbuat dari beton dan luas untuk dilewati”.<sup>57</sup>

Untuk program bantuan dana stimulan atau P2MP, pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur mengucurkan dana sebesar 350 juta/desa dari APBD. Dana tersebut diprioritaskan untuk masyarakat berbasis kelompok yang kurang mampu dan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di kecamatan Wotu, Wolter 16 februari 2016.

dijadikan sebagai modal usaha. Hasil wawancara dengan asisten I Bupati, Drs. Budiman, M.Pd mengatakan bahwa:

“seluruh desa mendapat bantuan dana tersebut dana stimulan itu bergulir terus, setelah keluar dari APBD dana tersebut tidak kembali ke kas tetapi itu bergulir terus dipinjamkan kepada kelompok masyarakat kalau kembali lagi lalu dipinjamkan lagi ke kelompok lainnya, kan ini berbasis kelompok. Dana ini memang difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat”.<sup>58</sup>

Hasil wawancara serupa disampaikan oleh kepala bidang kelembagaan, partisipasi masyarakat dan usaha ekonomi BPMPD kabupaten Luwu Timur, S.Desmety.B mengatakan bahwa:

“seluruh desa yang ada di kabupaten Luwu Timur mendapatkan dana stimulan. Dana ini dari APBD, terus dana ini sudah termasuk hibah ke desa, kabupaten langsung transfer ke masing-masing bendahara desa. Jadi kabupaten tidak pernah melihat uang itu karena sudah ditransfer ke bendahara masing-masing desa”.<sup>59</sup>

Adapun beberapa contoh program dana Stimulan atau P2MP kabupaten Luwu Timur yang berhasil penulis dapatkan selama penelitian, adalah:

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan asisten I bupati, Drs.Budiman,M.Pd 1 februari 2016

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan kepala bidang kelembagaan partisipasi masyarakat dan usaha ekonomi, S.Demesti.B 1 februari 2016

**Tabel 3 : Laporan Perkembangan Pinjaman Bulan  
Januari Tahun 2016**

NO	DUSUN KELOMPOK	ALOKASI PINJAMAN	TARGET PENGEMBALIAN S/D BULAN INI		REALISASI PENGEMBALIAN S/D BULAN LALU	
			POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA
1	Warga tani	15.000.000	15.000.000	250.000	15.000.000	250.000
2	Tansere	10.000.000	10.000.000	100.000	10.000.000	100.000
3	Harapan kasih	15.000.000	15.000.000	400.000	15.000.000	400.000
4	Suplir	20.000.000	20.000.000	200.000	20.000.000	200.000
5	saudara	20.000.000	20.000.000	200.000	20.000.000	200.000
6	Melati kawata	15.000.000	15.000.000	450.000	15.000.000	450.000
7	Bunga padi	15.000.000	15.000.000	250.000	15.000.000	250.000
8	Bunga sawit	15.000.000	15.000.000	430.000	15.000.000	430.000
9	Mekar jaya	14.000.000	14.000.000	600.000	14.000.000	600.000
10	Makmur	13.000.000	13.000.000	510.000	13.000.000	510.000
11	Trio	10.000.000	10.000.000	400.000	10.000.000	400.000
12	Sehati	13.000.000	13.000.000	260.000	13.000.000	260.000
13	Laworah indah	15.000.000	15.000.000	400.000	15.000.000	400.000
14	Aso aroa	2.000.000	2.000.000	120.000	2.000.000	120.000
15	Anggrek	14.000.000	14.000.000	420.000	14.000.000	420.000
16	Tegas	10.000.000	10.000.000	500.000	10.000.000	500.000
17	Cinta damai	15.000.000	15.000.000	150.000	15.000.000	150.000
18	Tuhua	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-
19	Kayu tanduk	10.000.000	10.000.000	200.000	10.000.000	200.000
20	Indah grup	20.000.000	20.000.000	1.050.000	20.000.000	1.050.000
21	Juku eja	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000	-
22	Citra mandiri	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-
23	Mawar	12.000.000	12.000.000	700.000	12.000.000	700.000
24	Tanduk	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-
25	Gembira	15.000.000	15.000.000	1.050.000	14.500.000	1.000.000
25	Angin ribut	15.000.000	15.000.000	900.000	15.000.000	900.000
27	Netral	15.000.000	15.000.000	1.320.000	11.250.000	1.020.000
28	Ceria	20.000.000	20.000.000	1.500.000	20.000.000	1.500.000
29	Merica	10.000.000	10.000.000	600.000	10.000.000	600.000
30	Pelangi	8.000.000	8.000.000	300.000	8.000.000	300.000
31	Lawora jaya	10.000.000	-	-	-	-
32	Senang sekali	3.000.000	3.000.000	90.000	3.000.000	90.000
33	Seroja	20.000.000	20.000.000	1.300.000	20.000.000	1.300.000
34	Bunga lada	25.000.000	18.750.000	1.500.000	12.000.000	1.000.000
35	Palem	11.000.000	11.000.000	990.000	7.800.000	670.000
36	Setia	10.000.000	10.000.000	500.000	10.000.000	500.000
37	Keluarga	17.000.000	17.000.000	1.020.000	10.000.000	600.000
38	Bunga keladi	6.000.000	6.000.000	420.000	6.000.000	420.000

39	Sinar harapan	23.000.000	23.000.000	1.380.000	23.000.000	1.380.000
40	Bugis	7.000.000	800.000	80.000	800.000	80.000
41	Chibi-chibi	24.000.000	19.200.000	1.920.000	16.800.000	1.680.000
42	Melati tanduk	11.000.000	11.000.000	600.000	600.000	600.000
43	Katu tanduk II	9.500.000	9.500.000	570.000	570.000	570.000
45	Setuju tani	21.000.000	21.000.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
46	Tansere	8.000.000	4.493.000	440.000	400.000	400.000
47	Suplir	20.000.000	15.600.000	1.560.000	1.360.000	1.360.000
48	Bunga mekar	15.000.000	5.500.000	900.000	900.000	900.000
49	Cinta damai	30.000.000	30.000.000	1.8000.00 0	-	-
50	Saudara	25.000.000	14.000.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000
51	Kayu tanduk	15.000.000	15.000.000	900.000	900.000	900.000
52	Santai	8.000.000	8.000.000	480.000	4.002.000	480.000
53	Tuhua	20.000.000	20.000.000	600.000	20.000.000	600.000
54	Harapan kasih	7.000.000	7.000.000	420.000	7.000.000	420.000
55	Reso pamase	7.000.000	7.000.000	420.000	-	-
56	Tanduk	7.000.000	7.000.000	420.000	-	-
57	Bunga padi	17.000.000	8.450.000	870.000	7.250.000	750.000
58	Sinangkali	10.000.000	-	600.000	-	600.000
59	Warga tani	14.500.000	6.750.000	715.000	5.500.000	580.000
60	Daeng	18.000.000	-	-	-	-
61	Anggrek	16.000.000	8.000.000	800.000	6.400.000	640.000
62	Bunga sawit	19.500.000	7.235.000	765.000	5.235.000	550.000
63	Makmur	16.500.000	5.834.500	635.000	4.376.000	470.00
64	Juku eja	13.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
65	Duren	10.000.000	-	-	-	-
67	Manggis	25.000.000	6.750.000	750.000	4.500.000	500.000
68	Seroja	25.000.000	5.000.000	500.000	2.500.000	250.000
69	Merica	7.500.000	750.000	75.000	-	-
70	Berhasil	15.000.000	-	-	-	-
71	Bunga keladi	10.000.000	834.000	100.000	-	-
72	Bina ilmu	20.000.000	4.000.000	400.000	2.000.000	200.000
73	Tanduk	8.500.000	-	425.000	-	425.000
74	Ceria	20.000.000	1.667.000	200.000	-	-
75	Mari-mari	12.000.000	500.000	50.000	-	-
76	Sinar harapan	20.000.000	-	800.000	-	800.000
77	Tuhua	20.000.000	1.000.000	500.000	-	400.000
78	Maccolli	13.000.000	1.300.000	130.000	-	-
79	Tanduk kayu	5.500.000	-	165.000	-	-
80	Reso pammase	13.000.000	-	-	-	-

**Sumber : Data BPMPD Kabupaten Luwu Timur**

Selama program bantuan dana stimulan ini berjalan,  
muncul berbagai masalah salah satunya adalah tidak lancarnya

pembayaran iuran yang dilakukan oleh nasabah atau kelompok masyarakat sebagai penerima modal usaha. Hasil wawancara dengan camat Wotu, Awaluddin Anwar S.STP. mengungkapkan bahwa;

“kami sekarang sedang berusaha agar dana atau uang yang dipinjamkan kemasyarakat dapat kembali lagi, kemudian dana uang tersebut diusahakan menjadi dana abadi desa”.<sup>60</sup>

Hasil wawancara lainnya dijelaskan lebih rinci lagi terkait masalah program dana stimulan. Seksi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, mengatakan bahwa:

“awalnya masih kacau banyak penyimpangan yang terjadi, banyak masalah artinya uang tersebut mengendap sama warga, pengurus dalam hal ini juga tidak bisa disalahkan karena ada warga yang mendengar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bahwa dana ini adalah dana hibah artinya dana yang terbagi habis, tapi pada prinsipnya dana tersebut adalah dana bergulir artinya uang tersebut berputar terus seperti sistem koperasi. Dari tahun 2010 uang tersebut sudah mengendap, dana yang masuk itu 350 juta/desa cuman karena uang tersebut sudah mengendap dari tahun 2010, maka tim kabupaten meminta kepada kecamatan dan kita sudah

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan camat Wotu, Awaluddin Anwar,STP 2 februari 2016



fasilitasi, kita sediakan semacam sosialisasi tentang dana ini, cuman karena adanya oknum-oknum tersebut jadi masyarakat berfikir bahwa dana tersebut terbagi habis”.<sup>61</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu desa yang ada dikecamatan wotu, mengatakan bahwa:

“banyak masyarakat yang tidak mengembalikan,dengan berbagai alasan, dana inikan diperuntukkan untuk masyarakat miskin, pas kami tagih mereka mengatakan bagaiman kami mau kembalikan untuk makan saja kami tidak ada”.<sup>62</sup>

pemerintah kecamatan Wotu dalam hal ini sebagai pengawasan secara umum terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam mengupayakan agar dana yang diberikan kepada masyarakat dapat kembali lagi dan menjadi dana abadi desa. Maka pemerintah kecamatan Wotu berkoordinasi dengan desa membentuk tim penyelesaian masalah, tim ini dibentuk agar nasabah yang melakukan penunggakan dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai peminjam. Langkah hukum sudah dilakukan oleh pemerintah dengan melaporkan kasus ini kepihak kepolisian dan kejaksaan, tapi karna adanya masukan dari beberapa pihak agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan maka

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, samuel 2 februari 2016

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan sekdes Cendana Hijau, Muhtahwan 7 februari 2016

pemerintah kecamatan Wotu beserta pemerintah desa berusaha melakukan komunikasi yang baik dengan nasabah dan hasilnya sekarang dana tersebut sudah kembali meskipun baru sebagian saja.

#### **4. Komunikasi Yang Baik**

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber kepada sasaran melalui sarana yang akan menimbulkan adanya dampak yaitu perubahan pada diri seseorang akibat dari pesan yang di terimanya baik berupa lambang, isyarat, Bahasa, gambar, atauperasaan.

Hubungannya dengan suatu organisasi, komunikasi memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini di sebabkan oleh kegiatan ini yang mengharuskan adanya pemahaman menyeluruh dan kesepakatan terhadap tujuan atau sasaran yang akan dicapai, sehingga dapat mendorong terwujudnya sikap partisipatif semua pihak.

Pemimpin merupakan pusat informasi yang dibutuhkan untuk memudahkan aparatnya melaksanakan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, penyampaian informasi harus dilandasi adanya kejelasan sehingga dapat diterima dan di mengerti.

Berhasil tidaknya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dengan sejauh mana komunikasi yang dilakukan antara camat dengan bawahannya atau mitra kerja di desa dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Hasil Wawancara dengan camat wotu, Awaluddin Anwar,S.STP mengatakan bahwa:

“komunikasi kami dengan desa dan masyarakat baik, jadi informasi yang kami dapat dari pemerintah daerah perihal program-program pemberdayaan masyarakat kami teruskan kedesa melalui rapat koordinasi tiap bulannya,kemudian desa meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat”.<sup>63</sup>

Senada dengan uraian diatas Hasil wawancara dengan Sekdes bawalipu, Yogi mengatakan bahwa:

“komunikasi antara camat dengan desa berjalan baik dan lancar, bisa dibilang hampir setiap saat saling komunikasi antara satu dengan yang lain, ketika kami butuh pak camat selalu memberikan arahan”.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Camat Wotu, Awaluddin Anwar, S.STP 2 februari 2016

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan kepala desa Bawalipu, Yogi Pratama 7 februari 2016

Hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Wotu, Nover Wangu mengungkapkan bahwa:

“komunikasi baik, camat lebih sering terjun langsung bertemu dengan desa, kemudian desa ke dusun, kalau memang ada informasi penting atau amanat atau dari bupati”.<sup>65</sup>

Terjadi komunikasi yang baik antara camat dengan bawahan dan camat dengan para kepala desa yang ada di kecamatan wotu. Camat mampu memberikan dampak yang baik dalam melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Nover Wangu 12 februari 2016

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

- a) Kewenangan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara umum berjalan secara efektif. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: Pertama, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat Wotu selalu berusaha mendorong masyarakat untuk mau terlibat secara langsung dalam pembangunan, meskipun masih ada beberapa masyarakat yang belum paham akan pentingnya pembangunan. Kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat secara umum usaha yang dilakukan oleh Camat Wotu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab demi terciptanya masyarakat yang berguna dan berdaya. Ketiga, melakukan evaluasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat secara umum menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Camat Wotu, agar semua kegiatan-kegiatan tidak menyimpang dari pelaksanaannya. Secara umum hal ini menggambarkan bahwa Camat Wotu mempunyai peran yang sangat penting, demi lancarnya pembangunan khususnya untuk prgoram-program pemberdayaan masyarakat.

- b) Hal-hal yang mempengaruhi kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat;kepemimpinan camat, sarana dan prasarana, dukungan anggaran, dan komunikasi yang baik. Dalam pelaksanaannya menunjukkan tidak ada permasalahan yang serius meskipun perbaikan pada beberapa bidang khususnya sarana dan prasarana perlu diperhatikan.

## **B. SARAN**

- a) Camat dalam pelaksanaan kewenangannya dalam hal ini koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan, mulai dari mendorong partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi harus lebih ditingkatkan agar dapat tercapai tujuan bersama yang lebih maksimal.

- b) Hal-hal yang mempengaruhi kewenangan camat seperti, kepemimpinan camat, sarana dan prasarana, dukungan anggaran, dan komunikasi yang baik. Harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan agar pelaksanaan kewenangan camat lebih maksimal dan pembangunan di daerah bisa lebih merata lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1995, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi Ilmu Administrasi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ganjong. 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadjon M. Philipus, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ilmar, Aminuddin. 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011, Kibernetologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Buku I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurcholis Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT Grasindo.
- Risyanti Riza, Drs.H. Roesmidi, M.M. 2006. Pemberdayaan Masyarakat, Alqaprint Jatinangor, Sumedang.
- Stroink F.A.M. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Apikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, citra Aditya Bakti, Bandung.
- Robert C. Bogdan, Translater Ahli Bahasa Arief Furchandkk. 1992, *Qualitative Research For Education An Introdoaction To Theory And Methods*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sadu Wasistiono, Dkk. 2002, Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan, Citra Pindo, Bandung.
- Syafrudin, Ateng. 1993, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, cet. Kedua, Citra Adjitia Bakti, Bandung.



Soerjono, Soekanto.2003,*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharto, Edi. 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Luwu Timur No. 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Peraturan Bupati Luwu Timur No 46 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Kantor Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Timur